

TNI AU Siapkan 2 Pesawat untuk Kirim Bantuan ke Turki

JAKARTA (IM) - TNI Angkatan Udara menyiapkan dua pesawat yaitu jenis Boeng 737 dan pesawat Hercules C-130 untuk mengirimkan bantuan kepada korban gempa di Turki.

Kepala Staf Angkatan Udara Marskhal TNI Fajar Prasetyo mengatakan, persiapan pesawat tersebut sebagai dukungan pengiriman bantuan pemerintah RI ke Turki yang dilanda gempa. "TNI AU mendukung pemerintah untuk mengirim bantuan Pemerintah RI ke negara sahabat Turki yang akan dilaksanakan besok, akan diberangkatkan satu pesawat Boeing 737 dan satu pesawat Hercules," ujar Fajar saat ditemui di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/2).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengkoordinasikan soal jumlah logistik dan jenis

bantuan yang akan diberikan ke para korban gempa di Turki.

"Kita akan membantu mengirimkannya, di kirim ke Turki," ujar Fajar. Sebagai informasi, Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 dan gempa susulan mengguncang Turkiye pada Senin (6/2) pagi. Gempa ini disebabkan oleh aktivitas tektonik sesar Anatolia yang ada di Turki dengan episentrum di dekat Kota Gaziantep.

Dilansir dari BBC, penyebab dari gempa Turkiye adalah lempeng Arab bergerak ke utara dan bersekan dengan lempeng Anatolia. Korban tewas akibat gempa Turkiye mencapai 12.049 orang dan 2.992 korban tewas berada di Suriah per 9 Februari 2023. Dari ribuan orang yang tewas tersebut, dua di antaranya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). • mei

Kepala BRIN Santai Meski Didesak Anggota Komisi VII DPR Agar Dicapot

JAKARTA (IM) - Komisi VII DPR RI merekomendasikan pemerintah mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. Tri Handoko santai soal Komisi VII DPR mendesak dirinya dicapot.

"Kalau dicapot, kan namanya juga usulan, ya munggo, itu kan namanya, itu kan ranah dan keputusan, apa ya..., ranah politik dari anggota ya. Ya boleh-boleh saja, ya nggak apa-apa gitu ya," kata Laksana Tri Handoko kepada wartawan di kantor BRIN, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Tri Handoko mengatakan diangkat menjadi Kepala BRIN dengan keputusan presiden (keppres). Dia mengatakan akan mengikuti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Tapi kan, ya, kalau saya kan saya ikut saja, kan tergantung Pak Presiden, toh. Kan saya diangkat dengan keppres, ya diberhentikan dengan keppres," ujarnya.

Tri mengaku sudah berte-

mu dengan Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri. Dia menuturkan Megawati merespons rekomendasi pencopotan itu sebagai hal biasa dalam dinamika politik. "Sudah (keputusan Megawati Soekarnoputri), kita kan memang sering ketemu, sudah dong," ujar Tri Handoko.

"Kan namanya juga dinamika, kalau di DPR kan biasa. Bu Mega saja jadi presiden nggak jadi dan seterusnya, dulu. Jadi ya biasa," ujarnya.

Komisi VII DPR sebelumnya merekomendasikan pemerintah untuk mengganti Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Tak hanya itu, komisi ini juga meminta BPK melakukan audit khusus terkait pagu anggaran BRIN. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto saat membacakan kesimpulan dalam rapat kerja bersama Laksana Tri Handoko di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1). • mei

Blangko e-KTP Tak Ditambah Lagi, Pemerintah Gencarkan KTP Digital di HP

JAKARTA (IM) - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak akan lagi menambah persediaan blangko e-KTP. KTP elektronik nantinya akan diganti menggunakan digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Hal itu disampaikan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh dalam Rakornas Dukcapil 2023 bertajuk 'Digitalisasi Adminduk untuk Kemudahan Layanan Publik dan Pemilu 2024' pada Rabu (9/2).

Zudan mengatakan kebijakan itu merupakan solusi asimetrik sebagai langkah bijaksana menggantikan penerbitan e-KTP yang masih banyak dikeluarkan masyarakat.

"Mengatasi kendala jaringan, ditambah pengadaan peralatan dan blangko itu mahal sekali. Maka Pak Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan agar menggunakan pendekatan asimetris, yakni dengan digitalisasi dokumen kependudukan termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)," kata Zudan.

Zudan pun mengungkapkan tiga kendala yang dihadapi Kemendagri dalam pencetakan e-KTP. Kendala itu adalah pengadaan blanko KTP-el yang mengambil porsi cukup besar anggaran Dukcapil, kemudian harus pula menyediakan printer dengan ribbon, cleaning kit, dan film.

Belum lagi, kata Zudan,

masalah kendala jaringan internet di daerah. Menurutnya, saat ada kendala jaringan pun, pengiriman hasil perekaman e-KTP tidak sempurna. Alhasil, lanjutnya, KTP tidak jadi karena failer enrollment dan perekaman sidik jari gagal karena tidak terkinir ke pusat. Karena itu, Pemerintah memutuskan untuk mengganti e-KTP menjadi KTP digital.

"Jadi kita tidak lagi menambahkan blangko tetapi kita mendigitalkan pelayanan adminduk. KTP elektronik diganti KTP digital," ujarnya.

Dukcapil menargetkan sebanyak 25 persen dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten/kota di Indonesia. "Mari kita bertransformasi ke KTP digital. Target tahun ini 25 persen atau 50 juta penduduk Indonesia memiliki KTP digital di HP-nya," kata Zudan.

Pendaftaran aplikasi IKD, harus didampingi petugas Dukcapil. Sebab, pendaftaran ini memerlukan verifikasi dan validasi yang ketat dengan teknologi face recognition.

"Sekali datang pemohon bisa langsung dapat KTP digital, dokumen kependudukan lainnya seperti KK dan lainnya sudah bisa langsung dipindahkan data digitalnya ke HP pemohon," katanya. • mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PERESMIAN RUMAH SUSUN UNTUK PPKS

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) bersama Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto (kanan) dan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto (kiri) meninjau Rumah Susun di sentra terpadu Pangudi Luhur di Bekasi, Jumat (10/2). Rumah susun untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS) terdiri dari 93 unit yang dapat menampung 360 orang dengan biaya Rp10.000 per bulan.

Novel Yakin Harun Masiku Tidak akan Ditangkap Selama Firli Jadi Ketua KPK

Jubir KPK Ali Fikri bantah tuduhan Novesl Baswedan. Ia memastikan bahwa lembaga antirasuah masih terus memburu tersangka korupsi Harun Masiku.

JAKARTA (IM) - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, yakin bahwa buron kasus korupsi yang dikenal sebagai kader PDI P, Harun Masiku, tidak akan tertangkap selama Firli Bahuri masih memimpin lembaga antirasuah itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Novel guna menanggapi momen Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Firli menjawab per-

kap Harun Masiku jika memang dia benar-benar diburu.

"Kalau memang dicari benar-benar mestinya bisa ditangkap," tulis Novel lagi.

Secera terpisah, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya optimis dalam memburu Harun Masiku. Ia meminta semua pihak menepis persepsi negatif dan narasi yang menyebutkan seakan-akan KPK tidak bekerja memburu nama-nama yang tercatat dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Saya pastikan KPK terus memburu dan mencari seluruh buronan KPK yang tersisa 4 itu," ujar Ali saat dikonfirmasi, Jumat (10/2).

Ali menyebut bahwa KPK terus bergerak dan meninda-

kanjuti informasi mengenai keberadaan Harun Masiku. Meski demikian, lembaga antirasuah tidak bisa mengungkap lebih lanjut mengenai mekanisme pencarian mantan kader partai banteng itu.

"Untuk tindak lanjutnya secara teknis tentu tidak bisa kami sampaikan," kata Ali.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, Harun Masiku berada di luar negeri. Asep mengungkapkan, KPK masih berkoordinasi dengan sejumlah agensi di luar negeri terkait pencarian Harun Masiku.

"Kalau Harun Masiku terakhir kan di mana? Mana, bukan. Ada di luar negeri," ujar Asep saat ditemui wartawan di kantornya, Kamis (5/9).

Asep mengatakan, KPK telah mendatangi berbagai lokasi yang diinformasikan menjadi tempat persembunyiannya para DPO. "Kalau ada dari rekan-rekan informasi kita ini datang," kata Asep.

Harun Masiku diketahui menjadi tersangka suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Suap diberikan agar ia ditetapkan sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan, menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Hasil Pemilu menyatakan Harun hanya mengantongi 5.878 suara di posisi keenam. Namun, PDI-P justru mengajukan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin. • han

Buronan Terpidana Kasus Korupsi Rp32 Miliar di Bank Syariah Mandiri Ditangkap Kejaksaaan

MEDAN (IM) - Tim tangkap buronan (Tabur) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangkap Direktur PT Tanjung Siram Memet S Siregar. Memet ditangkap di kediamannya di Jalan Sei Putih Baru, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Kamis (9/2) malam, sekitar pukul 19.30 WIB.

Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos A Tarigan, mengatakan Memet merupakan terpidana dalam kasus korupsi senilai Rp 32 miliar di PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

"Saat kita tangkap, yang bersangkutan kooperatif," kata Yos, Jumat (10/2).

Yos menjelaskan, Memet S Siregar sebelumnya, dituntut 14 tahun penjara oleh Jaks Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Simalungun atas dugaan korupsi Rp32 miliar pada permohonan modal kerja dan investasi kepada PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor

Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan, Simalungun. Dugaan korupsi itu terungkap lewat audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, Memet diputus tak bersalah dan dibebaskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara tersebut. Akan tetapi, JPU kemudian menyatakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan bebas itu.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 4178 K/Pid.Sus/2022, kata Yos A Tarigan, Terpidana Memet S Siregar selaku Direktur PT Tanjung Siram mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejari Simalungun dan menyatakan Memet S Siregar terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Pj. Kepala Cabang BSM KCP Perdagangan Dhanny Surya

Satria (berkas terpisah).

Hakim pun menjatuhkan pidana kepada Memet dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp400 juta. Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

"Dalam putusan MA tersebut juga terpidana dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.565.870.000 dan apabila tidak dibayar maka harta bendanya disita dan apabila tidak mencukupi, maka dipidana penjara selama 4 tahun," tandas Yos.

Mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini menambahkan, setelah diamankan di kawasan Jalan Sei Putih Baru, Terpidana Memet S Siregar dibawa ke Kantor Kejati Sumut untuk proses administrasi dan selanjutnya diserahkan ke Kejari Simalungun untuk diproses dan menjalani hukumannya sesuai putusan MA. • han



SIDANG PEMBACAAN VONIS MARDANI H. MAMING

Terdakwa kasus gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H. Maming (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan vonis secara virtual di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/2). Majelis Hakim memvonis Mardani H Maming dengan hukuman sepuluh tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan dan divonis membayar uang pengganti sebesar Rp110.604.731.752 dan jika tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.



PEMERIKSAAN TERSANGKA LUKAS ENEMBE

Tersangka Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe dikawal petugas saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/2). Penyidik KPK kembali memeriksa Lukas Enembe sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua

KPK Jadikan Laporan PPAK Petunjuk soal Rp1 T Uang Kejahatan Lingkungan ke Parpol

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai dugaan aliran uang Rp 1 triliun ke anggota partai politik (parpol) merupakan petunjuk.

PPATK sebelumnya menyebutkan uang tersebut merupakan hasil kejahatan lingkungan yang mengalir ke anggota parpol untuk pembiayaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, laporan tersebut bersifat intelijen dan belum menjadi bukti, serta masih sebuah petunjuk.

"Laporan intelijen itu belum menjadi alat bukti, tapi petunjuk awal agar bisa dikembangkan lebih lanjut dalam laporan hasil analisis dari PPAK," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (10/2).

Selama ini, PPAK selalu mengoordinasikan laporan hasil analisis (LHA) mereka dengan aparat penegak hukum (APH) lain, termasuk KPK. Ia mengungkapkan, KPK kerap mendapatkan LHA dari PPAK.

LHA yang disampaikan PPAK akan diperiksa lebih lanjut untuk dibawa ke proses pembuktian.

"Tentu KPK nanti ketika sudah dilaporkan oleh PPAK pasti dianalisis lebih

lanjut sehingga kemudian kita bicarannya melalui pembuktian," ujar Ali.

Ali mengaku belum mengetahui apakah LHA mengenai aliran uang kejahatan lingkungan itu telah diterima KPK.

Ia berdalih KPK harus memeriksa terlebih dahulu laporan-laporan yang dikirim dari PPAK.

"Karena memang kan banyak sekali laporan dari PPAK selalu diserahkan kepada KPK, dan dari KPK ada tim khusus yang menganalisis LHA PPAK," kata Ali.

Sebelumnya, Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPAK Danang Tri Hartono mengatakan bahwa ada aliran dana Rp 1 triliun ke anggota partai politik. Uang tersebut diduga bersumber dari kejahatan lingkungan atau green financial crime (GFC).

Menurutnya, kejahatan lingkungan berikut aliran dana semacam ini bukan dilakukan aktor independen.

"Luar biasa terkait GFC ini. Ada yang mencapai Rp 1 triliun (untuk) satu kasusnya dan itu alirannya ke mana, ada yang ke anggota partai politik," ujar Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPAK Danang Tri Hartono dalam Rapat Koordinasi Tahunan PPAK di Hotel Sultan, Jakarta, pada 19 Januari 2023.

• mei

PENGUMUMAN

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan akta No. 02, tgl 07 Februari 2023, dibuat dihadapan EKA SUGIARTI, SH., MKN, Notaris di Kota Tasikmalaya, akta Pembubaran perseroan terbatas PT. ANDALAN MITRA INTERNASIONAL, berkedudukan di Kota Depok memutuskan.

- Membubarkan Perseroan Terbatas PT. ANDALAN MITRA INTERNASIONAL.
- Menunjuk SUBARKAH sebagai Likuidator

Apabila terdapat kreditur atau pihak yang keberatan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal pengumuman ini, ditujukan ke alamat: Jl.H Nadih no.11,Rt.006,Rw.25,Kel.Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16418. Demikian pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 11 Februari 2023

Likuidator